

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROPINSI JAMBI**

Junita T¹⁾, Tona Aurora Lubis, H. Zamzami²⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi 2017

²⁾Dosen Pembimbing

***EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION TO THE FINANCIAL PERFORMNACE OF
DISTRICT/MUNICIPALITY IN
JAMBI PROVINCE***

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of fiscal decentralization to the financial performance of the District / Municipality in Jambi Province. The populations in this study are all districts / municipalities in Jambi Province. The populations in this study are 11 districts / cities, because the population is less than 100, then the entire population were being sampled. The analytical method used in this research is the PLS (Partial Least Square) by using software SmartPLS. PLS is one method for implementing the Structural Equation Modeling (SEM). The results of this study indicate that fiscal decentralization significantly affected on the financial performance of Regency / City in Jambi Province Year 2010-2014.

Keywords: Fiscal decentralization, financial performance area.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 kabupaten/kota karena jumlah populasi kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS (*Partial Least Square*) dengan menggunakan software *SmartPLS*. PLS merupakan salah satu metode untuk melaksanakan model *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Pelaksanaan otonomi daerah ini tidak terlepas dari pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi (Pakpahan, 2006) pembiayaan mandiri, dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah secara optimal. Optimalisasi sumber daya dimaksud termasuk permasalahan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan penerimaan daerah yang sebesar-besarnya menjadi modal daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Dengan adanya penerimaan daerah yang sebesar-besarnya yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat daerah mampu membiayai pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menjadikan adanya ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, besarnya dana perimbangan yang diterima oleh daerah tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan desentralisasi fiskal daerah. Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan di daerah sangat bergantung pada seberapa besar dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak.

Penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Pemilihan objek Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dikarenakan kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan dari beberapa sektor. Selain itu, realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, namun masih terlihat adanya ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini mencerminkan masih rendahnya desentralisasi fiskal Provinsi Jambi yang tentunya sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menunjukkan kemandirian daerah dan kewenangan luas dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap dana transfer pusat menunjukkan masih rendahnya kemandirian daerah yang tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana kinerja keuangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Untuk menggambarkan kinerja keuangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi praktisi maupun bagi akademisi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD.
2. Bagi mahasiswa atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik

terutama pada pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terutama di bidang akuntansi sektor publik.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

2. TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008:24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan menurut Kamus Akuntansi Manajemen, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai salah satu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau dihasilkan yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi.

Dari uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, dimaksud dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam perhitungan APBD.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan Pemda tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan sebuah “muara” dari “komitmen” atau “kesepakatan” antara eksekutif (kepala daerah dan jajarannya) dengan legislatif (DPRD) dalam satu tahun anggaran, yang di hulunya sendiri sudah dihiasi dengan berbagai asumsi dan “kompensasi” (Abdullah dan Halim, 2006).

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa untuk menilai kinerja keuangan dibuat rasio-rasio, yang merupakan perbandingan antara angka-angka tertentu dalam laporan keuangan dikalikan 100%. Hal ini menunjukkan nilai relatif atau proporsi di antara dua angka yang dipakai, yang diasumsikan memiliki hubungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang bersumber dari laporan keuangan Pemda (LKPD) (Abdullah dan Halim, 2006).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah (Halim, 2008) Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu Negara. Sedangkan Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Smith juga merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu Negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005).

Persentase derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu (Khusaini, 2006).

1. Desentralisasi Pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total

pengeluaran pemerintah (APBN). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

2. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

3. Desentralisasi Otonomi

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah. Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.

Menurut Halim (2007), untuk mengetahui persentase derajat desentralisasi fiskal, digunakan rumus berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel.1 sebagai berikut:

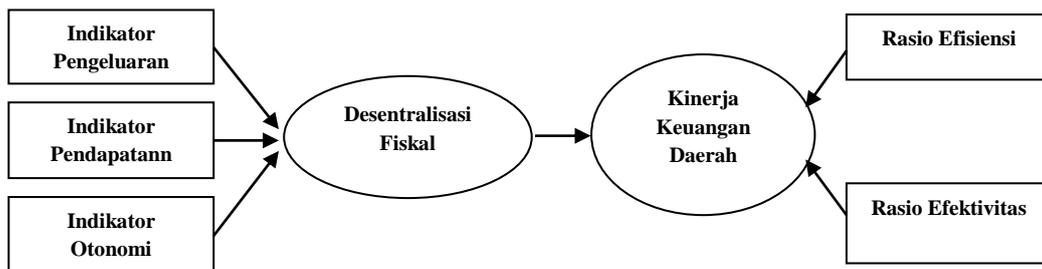
Tabel. 1
Kriteria Penilaian Tingkat
Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Halim (2001).

2.2 Kerangka Pemikiran

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 1
Model Penelitian

Gambar di atas menunjukkan bagaimana hubungan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Permasalahan pertama yaitu bahwa desentralisasi fiskal diukur menggunakan tiga indikator menggunakan indikator pengeluaran, indikator pendapatan, dan indikator otonomi, sedangkan kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas PAD. Permasalahan kedua yaitu pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah dimana pelaksanaan desentralisasi fiskal tentunya akan memperhitungkan optimalisasi pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Semakin tinggi PAD maka pelaksanaan desentralisasi fiskal akan semakin baik karena semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Hasilnya daerah dengan lebih leluasa melaksanakan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah inilah yang akan menjadi tolok ukur kinerja keuangan daerah.

Pembangunan infrastruktur di daerah merupakan faktor utama yang menunjang perkembangan pembangunan daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menunjang segala kegiatan pelaksanaan

pembangunan daerah menjadi lebih efektif dan mampu mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengelolaan belanja daerah dalam untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Pengelolaan belanja yang efisien dan efektif terutama bila dialokasikan pada belanja yang mampu mendorong peningkatan sumber pendapatan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi fiskal.

2.3 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3. METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bersifat hubungan *causal explanatory* yang bertujuan mengetahui pola hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan metode

causal explanatory sesuai dengan tujuan penelitian yaitu melakukan pengujian hipotesa yang menguji hubungan dan pengaruh diantara variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.2 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2002: 109) subyek penelitian mempunyai kedudukan sangat sentral, karena pada subyek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Arikunto (2002: 116) mengungkapkan bahwa subyek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan. Subyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3.3 Objek Penelitian

Sugiyono (2007) menyatakan bahwa objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini yaitu Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama lima tahun pada periode 2010 - 2014 serta data kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2010 - 2014 yang diambil dari data situs

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan <http://www.djpk.go.id>.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2007: 72) populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Sampel yaitu, bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik *sampling* yang digunakan yaitu *sampling* jenuh. Menurut Arikunto (2002: 112), “apabila subjek kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semua sebagai sampel penelitian”. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 kabupaten/kota karena jumlah populasi kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel desentralisasi fiskal sebagai variabel independen dan kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependen serta variabel alokasi belanja daerah dan dana perimbangan sebagai variabel kontrol.

Secara keseluruhan, operasionalisasi variabel penelitian digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Variabel Independen			
Desentralisasi Fiskal (X _i)	Ukuran untuk menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. (Halim, 2001)	<ol style="list-style-type: none"> Indikator pengeluaran diukur dengan rasio pengeluaran masing-masing pemerintah kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah pusat. $= \frac{\text{Total Pengeluaran Daerah}}{\text{Total Pengeluaran Pemerintah Pusat}} \times 100\%$ Indikator pendapatan diukur dengan rasio dari total pendapatan masing-masing pemerintah kabupaten/kota terhadap total pendapatan pemerintah pusat. $= \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Pendapatan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$ Indikator otonomi diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. $= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$ <p>Sumber: Haryanto, 2012</p>	Rasio
Variabel Dependen			
Kinerja Keuangan Daerah (Y)	Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2008)	<p>Rasio efisiensi</p> $= \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$ <p>Rasio efektivitas PAD</p> $\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$ <p>Sumber: Halim (2008)</p>	Rasio

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan *Partial Least Square (PLS)* menggunakan menggunakan *Struktural Equation Modeling (SEM)*. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua yaitu menggambarkan desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dilakukan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio rasio derajat desentralisasi fiskal yang dilihat dari indikator pengeluaran, indikator pendapatan, dan indikator otonomi, dan rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi untuk melihat kinerja keuangan daerah.

3.6.2 *Structural Equation Modelling (SEM)*

Metode analisis yang digunakan untuk pengujian variabel dalam penelitian ini adalah PLS (*Partial Least Square*) dengan menggunakan software *SmartPLS*. PLS merupakan salah satu metode untuk melaksanakan model *Structural Equation Modelling (SEM)*. Keuntungan dengan menggunakan PLS adalah PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena

tidak mengasumsikan data harus dengan skala tertentu dan jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006).

Untuk pengujian hipotesis atas pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan daerah dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil *path coefficient* dengan t_{tabel} . Hipotesis dapat dikatakan sangat signifikan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai p-value lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Statistik

4.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal diukur menggunakan 3 indikator yaitu indikator pengeluaran, indikator pendapatan dan indikator otonomi. Hasil analisis deskriptif pada ketiga indikator desentralisasi fiskal yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3
Deskriptif Statistik Desentralisasi Fiskal

Deskriptif Statistik	Indikator Pengeluaran (%)	Indikator Pendapatan (%)	Indikator Otonomi (%)
Min	0.03	0.04	2.26
Max	0.08	0.08	14.35
Rata-rata	0.05	0.06	5.32
Standar Deviasi	0.01	0.01	2.59

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 3 dapat digambarkan bahwa nilai indikator pengeluaran terendah sebesar 0,03, nilai indikator pengeluaran tertinggi sebesar 0,08 dengan nilai rata-rata sebesar 0,05 dan standar deviasi 0,01. Nilai indikator pendapatan terendah yaitu sebesar 0,04, nilai indikator pendapatan tertinggi sebesar 0,08 dengan nilai rata-rata indikator pendapatan 0,06 dan standar deviasi 0,01. Indikator otonomi terendah sebesar 2,26, nilai tertingginya 14,35 dengan nilai rata-rata 5,32 dan standar deviasi 2,59.

4.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi pengelolaan belanja dan rasio efektivitas PAD. Gambaran mengenai kinerja keuangan daerah secara deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Deskriptif Statistik Kinerja Keuangan Daerah

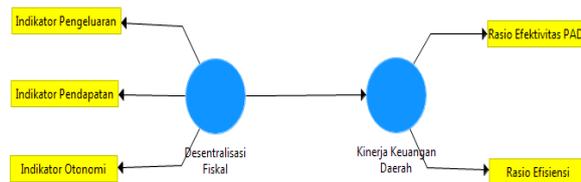
Deskriptif Statistik	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Efektivitas PAD (%)
Min	81.14	79,58
Max	127.76	127,97
Rata-rata	98.29	99,55
Standar Deviasi	8.04	8,61

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 4 dapat diketahui bahwa pada rasio efisiensi nilai maksimum sebesar 127,76 yang menunjukkan adanya daerah dengan realisasi belanja jauh lebih besar dari total pendapatan daerah. Hal ini berarti terjadi defisit anggaran pada tahun yang bersangkutan. Nilai maksimum untuk indikator Rasio efisiensi ini sebesar 127,76% yang berarti ada daerah dengan nilai surplus dalam realisasi anggarannya. Rata-rata skor pada indikator rasio efisiensi ini sebesar 98,29 yang artinya kebanyakan daerah masih mengalami defisit anggaran.

4.3 Struktur Model Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* pada model Structure Equation Modeling (SEM). Analisis data dilakukan menggunakan software SmartPLS 3.1. Pada model SEM, analisis data dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama yaitu pengujian *outer model* untuk melihat kemampuan setiap indikator untuk mengukur variabel latennya masing-masing. Langkah kedua yaitu pengujian *inner model* yaitu untuk menguji hubungan antar variabel laten. Berdasarkan gambaran tersebut, maka struktur model analisis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 2
Struktur Model Analisis

Berdasarkan gambar 2 terlihat adanya hubungan indikator dengan variabel latennya dan hubungan antar variabel laten. Desentralisasi fiskal diukur menggunakan indikator indikator pengeluaran, indikator pendapatan dan indikator otonomi. Sementara itu kinerja keuangan daerah diukur dengan indikator rasio efisiensi dan rasio efektivitas PAD.

Analisis *Structure Equation Modeling* (SEM) menggunakan 2 langkah analisis yaitu *outer model* (pengujian measurement) dan *inner model*. *Outer model* menjelaskan hubungan antar indikator dengan variabel latennya masing-masing, sedangkan *inner model* menjelaskan hubungan antar variabel laten. Dari gambar 2 terlihat jelas hubungan antara indikator dengan variabel latennya dan hubungan antar variabel laten.

4.4 Pengujian Measurement (Outer) Model

Pengujian *outer model* dilakukan untuk melihat kelayakan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten-nya. Pengujian ini dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas dari indikator yang digunakan.

4.4.1 Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel latennya jika nilai *loading factor*-nya lebih besar dari 0,05. Hasil *outer loading* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5
Nilai Loading Factor pada Indikator untuk Masing-masing Variabel Laten

Indikator	Variabel Laten	
	Desentralisasi Fiskal	Kinerja Keuangan Daerah
Indikator Pengeluaran	0,716	
Indikator Pendapatan	0,903	
Indikator Otonomi	0,967	
Rasio Efisiensi		0,842
Rasio Efektivitas PAD		0,948

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 5 dapat dilihat nilai *loading factor* untuk semua indikator lebih besar dari 0,5

yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel latennya masing-masing.

Tabel. 6
Hasil Pengujian Signifikansi Nilai Loading Factor pada Setiap Indikator

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Indikator Pengeluaran <- Desentralisasi Fiskal	0,716	9,163	0,000
Indikator Pendapatan <- Desentralisasi Fiskal	0,903	5,992	0,000
Indikator Otonomi <- Desentralisasi Fiskal	0,967	4,483	0,000
Rasio Efisiensi <- Kinerja Keuangan Daerah	0,842	5,624	0,000
Rasio Efektivitas PAD <- Kinerja Keuangan Daerah	0,948	3,912	0,000

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai p-value pada setiap indikator lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa semua

indikator secara signifikan dapat mengukur variabel latennya masing-masing.

Hasil pengujian *cross loading* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7
Hasil Pengujian Cross Loading

Indikator	Variabel	Desentralisasi Fiskal	Kinerja Keuangan Daerah
Indikator Pengeluaran		0,716	0,138
Indikator Pendapatan		0,903	0,096
Indikator Otonomi		0,967	0,350
Rasio Efisiensi		0,182	0,842
Rasio Efektivitas PAD		0,308	0,948

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 7 dapat dilihat bahwa nilai *loading factor* dengan masing-masing variabel latennya (angka yang dicetak tebal) lebih besar daripada nilai *loading factor* indikator dengan variabel laten yang lain. Hal ini menyatakan bahwa semua indikator mampu mengukur dengan baik variabel latennya masing-masing.

Pengujian validitas indikator pada analisis *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS juga dilakukan menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE digunakan untuk mengukur total varians konstruk yang dapat dijelaskan oleh pengukuran yang dilakukan. Nilai yang disarankan adalah lebih besar dari 0,5. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 8
Hasil Pengukuran Average Variance Extracted

	Average Variance Extracted (AVE)
Desentralisasi Fiskal	0,754
Kinerja Keuangan Daerah	0,804

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 8 dapat dilihat bahwa nilai AVE pada masing-masing variabel laten lebih besar dari 0,5, yang berarti bahwa semua indikator pada masing-masing variabel laten mampu mengukur dengan baik variabel latennya.

4.4.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat keandalan semua indikator untuk mengukur suatu konstruk. Konstruk dikatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* yang tinggi. Nilai yang disarankan untuk nilai *composite reliability* jika lebih besar dari 0,7. Nilai *composite reliability* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 9
Nilai Composite Reliability

Variabel Laten	Composite Reliability
Desentralisasi Fiskal	0,900
Kinerja Keuangan Daerah	0,891

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 9 dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* pada semua variabel lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti bahwa hasil pengukuran pada setiap konstruk reliabel dan mampu menjelaskan

dengan baik masing-masing variabel dimaksud. Pengujian reliabilitas juga diperkuat dengan nilai *cronbach alpha* sebagai berikut:

Tabel. 10
Nilai Cronbach Alpha Pengujian Reliabilitas

Variabel Laten	Cronbach's Alpha
Desentralisasi Fiskal	0,848
Kinerja Keuangan Daerah	0,771

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 9 dapat dilihat nilai *cronbach alpha* pada semua variabel lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa semua konstruk reliabel dan data hasil pengukuran semua indikator untuk mengukur variabel laten dapat diandalkan.

4.5 Pengujian Inner Model

Pengujian *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel laten.

4.5.1 Koefisien Path

Koefisien path menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Hasil analisis untuk melihat besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogennya yaitu sebagai berikut:

Tabel. 11
Koefisien Path Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Antar Variabel Laten	Koefisien Path
Desentralisasi Fiskal -> Kinerja Keuangan Daerah	0,288

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 11 dapat dirumuskan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah dengan koefisien path bernilai positif, yang berarti setiap peningkatan desentralisasi fiskal akan meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan besarnya pengaruh sebesar $0,288 \times 100\% = 28,8\%$.

signifikan terhadap variabel endogennya. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4.5.2 Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai *p-value* hasil pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05. Jika *p-value* $\leq 0,05$, maka hipotesis statistik diterima dengan demikian variabel eksogen berarti berpengaruh

Tabel. 12
Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

t Statistics	P Value
--------------	---------

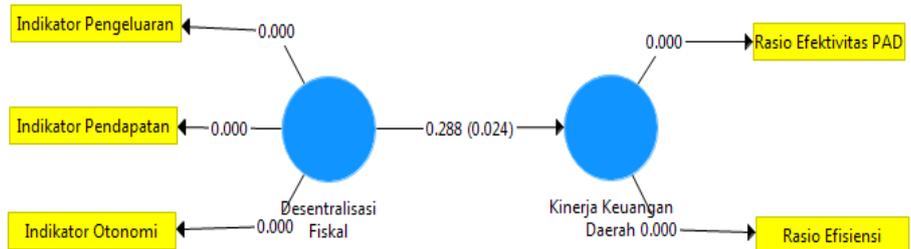
Desentralisasi Fiskal -> Kinerja Keuangan Daerah	2,272	0,024
--	-------	-------

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel. 12 dapat dirumuskan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai p-value sebesar 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian

desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Secara keseluruhan hasil analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 3
Hasil Analisis Data

Berdasarkan gambar 3 terlihat nilai p-value hubungan indikator dengan variabel latennya di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa indikator yang digunakan mampu mengukur variabel latennya dengan baik. Sementara itu nilai p-value pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

terlihat Kota Jambi dengan nilai tertinggi dengan rasio sebesar 14,35% yang terjadi di tahun 2014. Namun demikian nilai tersebut masih di bawah angka 20% yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pada setiap indikator pengukuran desentralisasi fiskal dengan nilai yang relatif kecil. Dengan demikian kemampuan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam mengelola keuangan daerahnya masih tergolong kecil. Hal ini dikarenakan masih rendahnya sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengakibatkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan yang berasal dari dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

Derajat Desentralisasi fiskal Kota Jambi periode Tahun 2010 - 2014 berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih menunjukkan derajat yang masih kurang. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih belum bisa terlepas dari ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat masih rendahnya realisasi PAD dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Dengan demikian sebagian besar penerimaan daerah Kota Jambi berasal dari dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini berarti bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan dari luar.

Kondisi pelaksanaan desentralisasi fiskal terutama terlihat dari indikator otonomi daerah pada pengukuran desentralisasi fiskal dengan membandingkan total PAD terhadap total penerimaan daerah. Kriteria penetapan derajat desentralisasi fiskal menyebutkan bahwa jika persentase PAD terhadap total penerimaan daerah kurang dari 10% tergolong dalam kategori sangat kurang, sedangkan jika antara 10% sampai 20% maka tergolong dalam kategori kurang. Berdasarkan hasil penelitian ini

Ketergantungan ini boleh jadi merupakan refleksi dari kurangnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau boleh jadi karena keterbatasan potensi sumber daya daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Merujuk pendapat Kuncoro (2003) dalam Haryanto (2012), terdapat lima penyebab rendahnya PAD yang pada gilirannya akan menyebabkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, yaitu: *Pertama*, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah. *Kedua*, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. *Ketiga*, walaupun pajak daerah cukup beragam, tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah. *Keempat*, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi dan separatisme jika daerah mempunyai sumber

keuangan yang tinggi. *Kelima*, adanya kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah di Provinsi Jambi memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat, maka upaya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus dilakukan. Upaya yang dapat ditempuh antara lain adalah dengan meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah. Peningkatan kompetensi aparatur ini menjadi sangat penting dikaitkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan lebih besar pada daerah di bidang perpajakan dibandingkan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Dengan peningkatan kompetensi aparatur ini diharapkan pemerintah daerah mampu untuk menyesuaikan perda pungutan daerah dengan peraturan yang baru, dan mampu untuk memilih, menginventarisasi, serta menetapkan instrumen pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi daerah sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif yang pada gilirannya dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pengalokasian belanja daerahnya demi mewujudkan kemajuan pembangunan daerah tersebut. Desentralisasi fiskal menunjukkan bagaimana pemerintah daerah sanggup melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara mandiri, sedangkan PAD merupakan sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Tingginya desentralisasi fiskal dan PAD menunjukkan kemampuan daerah membiayai pembangunan dengan sumber pendanaan dari daerah itu sendiri dan kecilnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi desentralisasi fiskal dan PAD berarti semakin tinggi pula kewenangan daerah dalam pelaksanaan anggaran daerahnya. Semakin besar kemampuan daerah melakukan pengelolaan daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. Kebijakan desentralisasi fiskal yang dititikberatkan pada kabupaten/kota, akan memberi keleluasaan daerah untuk melihat dan menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah dan disertai dengan keleluasaan pemerintahan daerah untuk membelanjakan dana alokasi yang diterima.

5.2 Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2014

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Jambi dilihat dari rasio efisiensi dan efektivitas PAD masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata pada rasio efektivitas PAD yang masih di bawah

100% yang berarti realisasi PAD masih di bawah nilai yang ditargetkan dalam anggaran. Sementara itu nilai efisiensi berada di bawah 100% yang berarti bahwa nilai belanja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Pengelolaan belanja yang lebih efisien menunjukkan bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi belanja yang lebih besar dari realisasi penerimaan daerah akan mengakibatkan nilai defisit dalam anggaran pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan rendahnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pada sisi lain, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD yang sebesar-besarnya menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Alokasi belanja daerah yang tepat sasaran terutama pada alokasi belanja modal akan sangat mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran. Alokasi belanja modal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah akan mempengaruhi semakin lancarnya proses pembangunan daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur berarti bahwa adanya penambahan aset daerah yang bisa menjadi penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Kondisi inilah yang akan membuat kinerja keuangan daerah akan semakin meningkat.

5.3 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2014

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan indikator pengeluaran, indikator pendapatan dan indikator otonomi mampu menjelaskan dengan baik perkembangan kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas PAD.

Desentralisasi fiskal menunjukkan bagaimana pemerintah daerah sanggup melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara mandiri. Daerah memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pengalokasian belanja daerahnya demi mewujudkan kemajuan pembangunan daerah tersebut. Tingkat desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan besarnya proporsi PAD dibandingkan dengan seluruh penerimaan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang dititikberatkan pada kabupaten/kota, akan memberi keleluasaan daerah untuk melihat dan menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah dan disertai dengan keleluasaan

pemerintahan daerah untuk membelanjakan dana alokasi yang diterima. Kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dengan menggali sumber-sumber PAD merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang efektivitas transfer pemerintah pusat kepada daerah. Oleh karena itu, pemberian transfer seharusnya disikapi pemerintahan daerah dengan upaya memacu pembangunan yang berkesinambungan dalam menciptakan kemandirian daerah dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu diikuti dengan pemberian inisiasi dari pemerintah dalam pengoptimalannya melalui kebijakan dan peraturan yang menguntungkan banyak pihak. Oleh karenanya PAD diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan utama dan mencerminkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, sedangkan Dana Perimbangan merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun komponen-komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil penelitian ini tentunya memberikan gambaran bahwa perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk meningkatkan PAD-nya dengan mengoptimalkan semua sumber PAD yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Optimalisasi pembangunan Daerah dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan PAD merupakan hal yang perlu

dilakukan sehingga akan meningkatkan derajat desentralisasi fiskal.

Kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Pada sisi lain, alokasi belanja daerah yang tepat sasaran terutama pada alokasi belanja modal akan sangat mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran. Alokasi belanja modal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah akan mempengaruhi semakin lancarnya proses pembangunan daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur berarti bahwa adanya penambahan aset daerah yang bisa menjadi penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Kondisi inilah yang akan membuat kinerja keuangan daerah akan semakin meningkat.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi .masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari nilai rata-rata indikator otonomi desentralisasi fiskal hanya sebesar 5,32%. Nilai ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat.
2. Kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.dilihat dari efisiensi anggaran masih belum efisien yang terlihat dari rata-rata rasio efisiensi masih di bawah 100%. Sementara itu rasio efektivitas PAD tergolong efektif dengan nilai rata-rata di atas 100%.
3. Desentralisasi fiskal, berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti menyumbangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya supaya menggunakan subjek yang lebih besar seperti penggunaan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga memperbesar jumlah pengamatan yang diteliti.
2. Peneliti selanjutnya supaya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah seperti alokasi belanja modal, Dana Perimbangan dan lain-lain.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. dan Halim, A. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, no. 2.
- Al-Gahtani, S.S., G.S.Hubona., J. Wang. 2007. *Information Technology (IT) in Saudi Arabia: Culture and Acceptance and Use of IT*. *Information & Management* 44, 681-691.
- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*, Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Elmi, Bachrul, 2002. *Kebijaksanaan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Otonomi Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. *Kompak*. STIE YO. Yogyakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Haryanto, Dedy Tri. 2012. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi*. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Henseler, J., Ringle, C.M., and Sinkovicks, R.R., 2009, *The Use of Partial Least Square Path Modelling in International Marketing*, *Advances in international marketing*, 20, 271-319.
- Hidayat, Syarif, 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang, BPFE Unibraw.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Ekonomika Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mahi, Raksaka, 2002. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, Jakarta, 25 Agustus 2002.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Nasution, Nina Andriany. 2010. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Republik Indonesia, Jakarta.
- Sidik, Machfud, 2009. *Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004 Dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Kesepuluh. Alfabeta. Bandung.
- Tanzi, V., 1995. *Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects*," in: Bruno, Michael, and Boris Pleskovic (eds.), *Annual World Bank Conference on Development Economics 1995*, World Bank, Washington, D.C.

- Tim Litbang Depdagri. 1991. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal. Fisipol UGM: Yogyakarta.
- Woller, M Gary dan Phillips Kerk, 1998. *Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An Empirical Investagion, The Journal of Developmnet Studies*; April 1998;34,4.
- Yuhayani, Nizarni. 2008. Pengaruh Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (Dengan Pendekatan Balanced Scorecard). Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.